

BAB II KONDISI POLITIK LOKAL KABUPATEN KUDUS

2.1 Gambaran Umum Kabupaten Kudus

2.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Kudus adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang secara geografis memiliki posisi strategis dan karakter wilayah yang unik. Luas wilayah Kabupaten Kudus adalah sekitar 42.516 hektar, yang merupakan sekitar 1,31 persen dari luas total Provinsi Jawa Tengah. Meskipun termasuk wilayah dengan luas terkecil di provinsi ini, posisi Kudus cukup penting sebab berada di jalur yang menghubungkan beberapa kabupaten lain dan kota besar di Jawa Tengah.

Secara administrasi, ujung-ujung wilayah Kabupaten Kudus berbatasan dengan empat kabupaten lain, yaitu Kabupaten Jepara dan Pati di sebelah utara, Kabupaten Pati di sebelah timur, Kabupaten Grobogan dan Pati di sebelah selatan, serta Kabupaten Demak dan Jepara di sisi barat. Letak geografis Kudus secara tepat berada pada koordinat antara 6°51' sampai 7°16' Lintang Selatan dan 110°36' hingga 110°50' Bujur Timur. Jarak terjauh wilayah Kudus dari barat ke timur sekitar 16 kilometer dan dari utara ke selatan sekitar 22 kilometer.

Pembagian administratif Kudus terdiri atas 9 kecamatan, yaitu Kaliwungu, Kota, Jati, Undaan, Mejobo, Jekulo, Bae, Gebog, dan Dawe. Seluruh kecamatan ini terbagi lagi menjadi 123 desa dan 9 kelurahan. Kecamatan Dawe adalah area terluas dengan luas 8.584 hektar atau sekitar 20,19 persen dari total wilayah, sedangkan Kecamatan Kota adalah yang terkecil dengan luas 1.047 hektar (2,46 persen). Kepadatan penduduk di Kudus pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 821.000 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 1.829 jiwa per km². Kecamatan Kota

memiliki kepadatan tertinggi yaitu 8.861 jiwa per km², yang menandakan konsentrasi penduduk tinggi di pusat kota.

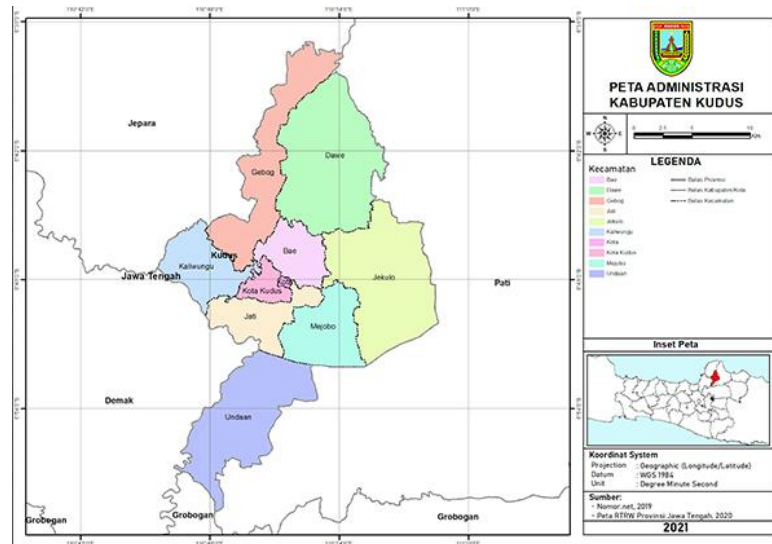
Topografi Kabupaten Kudus sebagian besar didominasi oleh dataran rendah yang luas, sekitar 68 persen wilayah merupakan daerah dengan kemiringan 0 hingga 2 persen yang relatif datar, sehingga mendukung pengembangan wilayah baik untuk permukiman maupun pertanian. Wilayah datar ini terutama meliputi enam kecamatan yaitu Kota, Jati, Kaliwungu, Undaan, Mejobo, dan Jekulo. Sebagian kecil wilayahnya berupa daerah bergelombang dengan kemiringan 2 sampai 15 persen, yang ada di Kecamatan Bae.

Sedangkan di bagian utara Kudus terdapat pegunungan Muria yang menjadi ciri geografis penting. Pegunungan Muria ini meliputi beberapa puncak utama yang menjadi landmark kawasan tersebut, seperti Gunung Saptorenggo setinggi 1.602 meter di atas permukaan laut dan Gunung Rahtawu setinggi 1.522 meter, serta Puncak Argojembangan dengan ketinggian sekitar 1.410 meter. Wilayah ini memiliki kemiringan yang cukup curam, dari 15 hingga lebih dari 40 persen, terutama di Kecamatan Gebog dan Dawe.

Kudus dibelah oleh Sungai Gelis di bagian tengah, yang membagi wilayah menjadi Kudus Barat dan Kudus Timur. Selain Gelis, terdapat pula sungai lain yang penting seperti Sungai Serang yang membatasi Kudus dengan Kabupaten Demak di sisi barat. Wilayah ini juga memiliki waduk Logung yang terletak antara Kecamatan Jekulo dan Dawe yang berfungsi sebagai tandon air untuk kebutuhan pertanian saat musim kemarau.

Iklim di Kudus adalah tropis dengan curah hujan tahunan antara 2.000 hingga 3.000 mm dan intensitas hujan berkisar rata-rata 97 hingga 132 hari hujan

per tahun. Temperatur udara relatif sedang mengikuti iklim tropis dengan rata-rata ketinggian wilayah sekitar 55 meter di atas permukaan air laut, yang turut mendukung pertanian dan aktivitas manusia di Kabupaten Kudus.



Berdasarkan peta administrasi dan kondisi topografi, jenis batuan, jenis tanah, ketinggian, serta keadaan hidrologi/sumber air, wilayah Kabupaten Kudus dapat dibagi menjadi tiga zona wilayah sebagai berikut:

a) Zona Pegunungan Muria di Utara

- Meliputi Kecamatan Dawe dan Gebog yang terletak di bagian utara Kabupaten Kudus.
- Wilayah ini didominasi oleh pegunungan dengan batuan vulkanik tua dari Gunung Muria yang membentuk relief bergelombang hingga curam.
- Ketinggian berada pada kisaran 600 hingga lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut.
- Sumber air utama berasal dari mata air pegunungan dan anak-anak sungai yang mengalir ke wilayah lebih rendah.

- Jenis tanah di zona ini adalah tanah laterit dan andosol yang cukup subur untuk hutan dan perkebunan.

b) Zona Dataran Rendah Tengah

- Meliputi Kecamatan Kota, Kaliwungu, Jati, Jekulo, dan Mejobo yang merupakan pusat pemerintahan dan permukiman utama.
- Topografi relatif datar dengan kemiringan kurang dari 2 persen, memudahkan aktivitas pertanian dan pembangunan.
- Ketinggian bervariasi antara 0 hingga 50 meter di atas permukaan laut.
- Jenis batuan didominasi oleh endapan alluvial dan tanah mineral yang subur.
- Wilayah ini memiliki sumber air berupa sungai besar, seperti Sungai Gelis, serta jaringan irigasi untuk mendukung pertanian padi dan tanaman hortikultura.

c) Zona Dataran Rendah Selatan dan Perbatasan

- Meliputi Kecamatan Undaan dan sebagian Kecamatan Bae yang berdekatan dengan Kabupaten Grobogan dan Demak.
- Topografi datar hingga bergelombang ringan dengan ketinggian berkisar 0-30 meter di atas permukaan laut.
- Jenis tanah berupa aluvial dan tanah sawah yang mendominasi daerah pertanian.
- Zona ini memiliki potensi sumber air dari sungai kecil dan saluran irigasi yang mendukung pertanian dan permukiman.

Secara keseluruhan, kondisi geografis Kabupaten Kudus dengan kombinasi dataran rendah yang luas dan pegunungan di bagian utara memberikan keunikan tersendiri dalam pengembangan wilayah, kehidupan sosial, ekonomi, dan dinamika politiknya.

2.1.2 Kondisi Perekonomian

Perekonomian Kabupaten Kudus merupakan salah satu yang paling dinamis di wilayah Pantura Jawa Tengah, dengan ciri khas sebagai kota industri yang didominasi oleh sektor pengolahan, terutama industri rokok kretek yang menjadi tulang punggung perekonomian daerah. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kudus sangat besar, yakni mencapai sekitar 77,71 persen dari total PDRB pada tahun 2024. Industri rokok kretek, sebagai sektor inti, menyumbang hampir 70 persen dari PDRB tersebut, dimana perusahaan Djarum menjadi pelaku utama yang memengaruhi stabilitas dan pertumbuhan ekonomi setempat.

Selain industri rokok, terdapat pula sektor industri pengolahan lain seperti makanan dan minuman, kertas, serta produk industri kecil dan menengah yang turut memperkuat struktur ekonomi lokal. Dari sisi pertumbuhan, sektor industri pengolahan mengalami peningkatan meskipun relatif lambat, dengan pertumbuhan sekitar 1,76 persen di tahun 2024, setelah periode perlambatan akibat dampak regulasi cukai dan kondisi pandemi Covid-19 sebelumnya.

Selain sektor industri, sektor perdagangan besar dan eceran bersama dengan reparasi kendaraan bermotor memberikan kontribusi sebesar 5,83 persen terhadap PDRB Kudus. Sektor konstruksi juga menunjukkan peran penting dengan andil

sekitar 3,81 persen serta mencatat pertumbuhan relatif tinggi mencapai 7,51 persen, menandakan adanya investasi dan pembangunan infrastruktur yang signifikan di wilayah ini. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang meskipun berada di bawah sektor industri, tetap memberikan kontribusi sebesar 2,52 persen dengan pertumbuhan positif 5,12 persen, sebagai sumber penghidupan alternatif bagi sebagian masyarakat.

Peran sektor informal, khususnya UMKM dan perdagangan kecil, sangat vital dalam menopang kehidupan ekonomi masyarakat Kudus. Usaha mikro, kecil, dan menengah tersebar luas di seluruh kecamatan dengan berbagai tipe usaha seperti toko kelontong, warung makan, jasa lokal, dan usaha kerajinan tangan, yang tidak saja menyerap tenaga kerja tetapi juga menjaga keseimbangan ekonomi di tingkat rumah tangga. Keberadaan sektor ini menjadi penyangga penting dalam menghadapi fluktuasi ekonomi makro khususnya pada masa pandemi.

Kudus juga berperan sebagai kota industri dan jasa strategis di jalur utama antara Jakarta, Semarang, dan Surabaya, menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang melayani tidak hanya kabupaten sendiri tetapi juga wilayah sekitarnya. Terdapat lebih dari 12.000 unit usaha industri, mulai usaha besar, menengah hingga rumah tangga yang tersebar, mencerminkan keragaman struktur ekonomi yang kompleks dan tersier.

Pada tahun 2024, perekonomian Kudus menunjukkan pemulihan yang cukup signifikan dengan pertumbuhan mencapai 2,78 persen, meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 2,19 persen. Peningkatan ini didorong oleh perbaikan di berbagai sektor, khususnya sektor industri pengolahan dan konstruksi. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga

berlaku (ADHB) mencapai Rp128,611,84 miliar, sementara PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) sebesar Rp75.010,79 miliar, menunjukkan adanya peningkatan nilai tambah dan kapasitas produksi daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang membaik diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga daya beli sekaligus akses mereka terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Pemerintah daerah bersama pelaku usaha terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif, termasuk peningkatan investasi infrastruktur dan optimalisasi program pemberdayaan UMKM agar pertumbuhan ekonomi Kudus dapat berkelanjutan dan inklusif.

2.1.3 Keadaan Sosial, Pemerintahan, dan Kelembagaan

Kabupaten Kudus memiliki struktur pemerintahan daerah yang terorganisir dengan baik dan terdiri dari 9 kecamatan, yang masing-masing terbagi menjadi 123 desa dan 9 kelurahan. Pemerintahan daerah Kabupaten Kudus terdiri atas beberapa unsur utama, yakni unsur staf seperti Sekretariat Daerah yang bertugas sebagai pengelola administrasi, unsur lini berupa dinas-dinas daerah yang menangani berbagai bidang pelayanan publik dan pembangunan, serta unsur lembaga teknis daerah yang berfungsi mendukung operasional pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi perangkat daerah (OPD) di Kudus cukup lengkap, mencakup berbagai dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, serta lembaga teknis lainnya yang berperan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang teknis sesuai tupoksinya. Struktur ini disusun untuk memberikan pelayanan optimal dalam berbagai aspek sosial, ekonomi, dan pembangunan fisik. Pemerintah Kabupaten juga dibantu oleh kecamatan dan

desa/kelurahan yang memiliki peranan vital dalam mengimplementasikan program di tingkat paling bawah.

Dari sisi sosial budaya, masyarakat Kudus dikenal sebagai masyarakat santri yang sangat menjunjung tinggi tradisi Islam. Hal ini dipengaruhi oleh sejarah panjang keberadaan Wali Songo di Kudus, terutama Sunan Kudus yang merupakan tokoh sentral dalam penyebaran Islam di wilayah Jawa Tengah. Karena itu, kehidupan sosial dan kebudayaan di Kudus sangat kental dengan nuansa religius dan tradisi keagamaan yang kuat. Pesantren di Kudus berperan sentral sebagai pusat pendidikan dan pengembangan kebudayaan Islam yang melibatkan ribuan santri dari dalam dan luar Kabupaten Kudus.

Pengaruh Islam juga sangat terlihat dalam organisasi kemasyarakatan dan politik di Kudus. Banyak ormas Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan organisasi keagamaan lainnya memiliki jaringan luas yang aktif berperan dalam kehidupan sosial masyarakat serta berkontribusi dalam bidang sosial politik. Selain itu, pesantren juga berkontribusi dalam membentuk sikap dan partisipasi politik warga, membentuk norma sosial yang mempengaruhi dinamika politik lokal.

Menjelang Pilkada, kelembagaan politik di Kudus menunjukkan dinamika yang kompleks dengan keterlibatan berbagai aktor seperti tokoh agama, tokoh partai politik, pemuda, dan jaringan sosial masyarakat. Kehidupan kelembagaan politik ini menjadi arena interaksi antara nilai keagamaan dengan kepentingan politik praktis, sehingga Pilkada di Kudus tidak hanya sekadar kontestasi elektoral namun juga refleksi pergulatan sosial budaya.

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik di Kabupaten Kudus juga menunjukkan angka yang menggembirakan. Berbagai dinas dan kecamatan melaporkan nilai IKM rata-rata di atas 80 persen, yang mencerminkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik, baik di bidang administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, maupun pelayanan sosial lainnya. Hal ini menunjukkan kualitas pelayanan pemerintah yang relatif memadai dan berupaya memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.

Selain itu, Kabupaten Kudus menerapkan berbagai program untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat, termasuk penguatan kelembagaan desa dan pemberdayaan UMKM berbasis komunitas. Program-program ini didukung oleh regulasi daerah dan sinergi antar OPD sehingga pelayanan masyarakat berorientasi pada akuntabilitas dan transparansi. Dari perspektif hukum, Kabupaten Kudus merupakan daerah otonom tingkat II di bawah Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri sesuai prinsip desentralisasi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pelaksanaannya.

Status otonomi ini memberikan hak kepada Pemerintah Kabupaten Kudus untuk mengambil kebijakan lokal yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah, termasuk pengelolaan sumber daya alam, penyelenggaraan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan keuangan daerah. Kabupaten Kudus memiliki kelembagaan pemerintahan yang lengkap, mulai dari bupati sebagai kepala daerah, DPRD Kabupaten sebagai lembaga legislatif, serta perangkat daerah yang mengatur berbagai bidang urusan pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 6 Tahun 2024 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kudus terbagi menjadi tiga jenis utama, serupa dengan struktur pemerintah daerah lain di Indonesia:

1. Urusan Pemerintahan Wajib (Pelayanan Dasar)

Urusan ini mencakup pelayanan dasar yang wajib diberikan kepada masyarakat guna memenuhi kebutuhan pokok dan kesejahteraan warga. Di Kabupaten Kudus, pelayanan dasar ini meliputi sektor pendidikan (sekolah dasar hingga menengah), kesehatan (puskesmas dan rumah sakit umum daerah), pelayanan sosial, infrastruktur dasar (jalan desa, sanitasi), dan administrasi kependudukan (catatan sipil dan pelayanan publik lainnya). Pelayanan dasar menjadi prioritas utama pemerintah agar kualitas hidup masyarakat terus meningkat.

2. Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait dengan Pelayanan Dasar

Selain pelayanan dasar, pemerintah Kabupaten Kudus juga bertanggung jawab menjalankan urusan pemerintahan wajib lain yang bukan pelayanan dasar, namun penting untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dan pengembangan wilayah. Contohnya adalah pengelolaan lingkungan hidup, perizinan usaha, tata ruang, pertanahan, pembangunan ekonomi daerah, dan pengembangan sumber daya manusia. Kewenangan ini mendukung keberlangsungan pembangunan yang terintegrasi sesuai potensi dan kebutuhan Kudus.

3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Urusan ini bersifat fleksibel dan dapat dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Kudus sesuai prioritas dan potensi daerah. Kabupaten Kudus dapat menentukan fokus tambahan misalnya pengembangan pariwisata religius, peningkatan teknologi informasi, pengembangan UMKM, budaya lokal, dan inovasi layanan publik baru. Hal ini memberikan keleluasaan bagi Kudus untuk berinovasi dalam merancang kebijakan yang relevan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya wilayahnya.

Secara kelembagaan, Pemerintah Kabupaten Kudus memiliki perangkat lengkap yang mendukung pelaksanaan urusan-urusan ini, mulai dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, dan unit teknis pelaksana lainnya. Pemerintah daerah juga didukung oleh DPRD yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan.

Kewenangan otonomi ini juga mendorong Kabupaten Kudus untuk aktif menggali potensi lokal, seperti potensi industri rokok kretek, sektor perdagangan, jasa, serta pariwisata religi yang unik, dengan tujuan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, Kudus juga harus menghadapi tantangan pembiayaan pembangunan karena sebagian besar dana daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat.

Sebagai catatan tambahan, meski Kudus adalah kabupaten dengan potensi ekonomi yang kuat dan menjadi kandidat ibukota potensial provinsi baru hasil pemekaran Jawa Tengah (calon Provinsi Jawa Utara), status hukumnya tetap sebagai kabupaten otonom yang tunduk pada kerangka hukum nasional dan provinsi. Kerangka otonomi daerah ini menjadi landasan penting dalam

pelaksanaan desentralisasi pemerintahan dan pembangunan yang berbasis pada kebutuhan dan karakteristik khusus daerah Kudus.

2.2 Dinamika Politik Lokal Kabupaten Kudus

Politik lokal di Kabupaten Kudus pasca era reformasi mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan dominasi empat partai politik besar yang menjadi aktor utama dalam arena politik lokal, yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keempat partai ini memiliki basis massa yang cukup kuat dan jaringan yang luas hingga ke tingkat desa, mampu membentuk koalisi kuat yang mempengaruhi hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan politik legislatif di Kudus.

Kontestasi politik di Kudus selama Pilkada memperlihatkan persaingan sengit antarkoalisi partai, dimediasi oleh tokoh politik lokal yang memiliki pengaruh dan jaringan sosial yang mendalam di masyarakat. Koalisi politik ini sering kali cukup dinamis dan berubah-ubah mengikuti kepentingan strategis masing-masing partai. Tokoh-tokoh lokal yang menonjol dalam berbagai Pilkada biasanya berasal dari kalangan elit politik, pengusaha, tokoh agama, dan kadang berasal dari pengurus partai besar yang memiliki modal sosial kuat.

Salah satu ciri khas yang menjadi tantangan serius bagi demokrasi lokal di Kabupaten Kudus adalah maraknya praktik politik uang (*money politics*). Politik uang telah menjadi fenomena berulang di Kudus dan melekat dalam kultur politik lokal sebagai alat efektif untuk memobilisasi suara pada pemilu dan pilkada. Bentuk politik uang yang terjadi sangat variatif, mulai dari pemberian uang tunai langsung kepada pemilih, distribusi sembako, barang kebutuhan pokok, bantuan modal

usaha, hingga jasa dan pekerjaan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu yang menjadi basis dukungan.

Pemilih kelas bawah menjadi sasaran utama dalam praktik politik uang ini, karena ketergantungan ekonomi membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh materi atau bantuan yang ditawarkan oleh para calon atau broker politik. Jaringan patron-klien yang sudah lama tumbuh di Kudus memainkan peran sentral dalam mekanisme distribusi politik uang ini, di mana para broker atau perantara politik—kerap disebut sebagai Botoh—memanfaatkan hubungan sosial untuk mengatur mobilisasi pemilih sesuai kepentingan patron. Hubungan ini menciptakan struktur sosial-politik yang kompleks dan terkadang sulit diubah, karena bukan hanya bermuatan materi, tapi juga melibatkan loyalitas sosial dan budaya.

Praktik politik uang ini tidak hanya tampak pada level pemilih individu, tetapi juga kerap melibatkan kelompok masyarakat, tokoh lokal, serta organisasi tertentu yang menjadi bagian dari jaringan politik dan ekonomi. Fenomena ini menimbulkan dilema dan tantangan bagi penyelenggara pemilu, lembaga pengawas, serta aktor masyarakat sipil yang berupaya menjaga integritas demokrasi di Kudus. Meskipun demikian, upaya penegakan hukum dan edukasi politik semakin diperkuat sebagai respons terhadap praktik korupsi politik ini.

Secara umum, dinamika politik pada tingkat lokal Kudus menunjukkan keseimbangan antara tradisi politik yang telah ada sejak lama dan modernisasi politik yang dipicu oleh reformasi dan tuntutan keterbukaan. Interaksi antara elit politik, partai, dan masyarakat membentuk sebuah sistem politik lokal yang khas, dengan pola komunikasi, mobilisasi, dan konstituensi yang unik..

2.3 Peran Jaringan Sosial Botoh dalam Politik Lokal

Dalam politik lokal Kabupaten Kudus, jaringan sosial memainkan peran yang sangat strategis, khususnya melalui aktor yang dikenal dengan sebutan Botoh. Botoh adalah broker politik lokal yang memegang peranan penting sebagai penghubung antara calon politik dengan basis pemilihnya. Fungsi Botoh bukan sekedar mediator atau perantara; tetapi juga menjadi aktor yang mengorganisir, mengarahkan, dan memobilisasi dukungan pemilih secara efektif berdasarkan jaringan sosial dan patron-klien yang sudah terbangun lama di masyarakat Kudus.

Hubungan patron-klien yang kuat antara Botoh dengan tokoh masyarakat lainnya seperti kepala desa dan tokoh agama, membentuk sebuah sistem sosial-politik yang erat dan sulit dipisahkan. Tokoh agama dan ormas Islam memiliki pengaruh yang sangat besar dalam budaya dan politik lokal di Kudus. Jejaring sosial yang terbentuk dari relasi keagamaan dan sosial ini dimanfaatkan secara nyata dalam mekanisme perekrutan dan mobilisasi suara dalam Pilkada, termasuk dalam praktik politik uang (*vote buying*).

Dalam konteks Pilkada Kudus 2024, jaringan Botoh digunakan secara efektif oleh aktor politik untuk memperluas dukungan dan melakukan mobilisasi massa. Banyak calon dan tim pemenangan yang menggandeng tokoh pesantren dan ormas sebagai bagian dari strategi politik untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat melalui saluran sosial yang sudah mapan.

Praktik *vote buying* dalam jaringan ini berkembang subur karena kondisi sosial yang menekankan pentingnya loyalitas, rasa saling percaya, dan hubungan personal dalam struktur sosial masyarakat. Politisi menggunakan Botoh

sebagai perantara utama untuk mengelola distribusi materi politik, baik berupa uang tunai, barang, maupun bentuk bantuan lainnya kepada pemilih dengan mekanisme yang sistematis dan terkoordinasi. Botoh memiliki akses langsung ke pemilih dan memahami lapisan sosial ekonomi masyarakat sehingga mampu menyesuaikan pendekatan yang efektif dalam mendapatkan suara.

Selain sebagai pengelola distribusi bantuan politik, Botoh juga menjalankan fungsi sosial kontrol dan memantau loyalitas pemilih, memastikan suara yang sudah 'dibeli' tidak berpindah ke calon lain. Oleh karena itu, keberadaan Botoh sebagai aktor jaringan sosial ini sangat sentral dalam keseluruhan strategi kemenangan Pilkada di Kudus.

Transformasi peran Botoh dari semula sebagai petaruh dalam judi politik menjadi broker politik yang semakin profesional dan sistematis menunjukkan bahwa praktik politik lokal di Kudus telah mengalami adaptasi dan perkembangan. Pola kerja Botoh kini tidak saja berkutat pada keuntungan ekonomi sesaat, tetapi juga membentuk aliansi politik jangka panjang dengan calon dan partai, menciptakan jaringan yang semakin kuat dan sulit ditembus.

Fenomena ini mencerminkan kompleksitas demokrasi lokal di Kudus yang semakin pragmatis dan transaksional, namun pada saat yang sama juga menampilkan dinamika sosial budaya yang khas. Peran jaringan sosial dalam politik lokal Kudus merupakan contoh bagaimana elemen budaya, agama, dan sosial ekonomi saling berinteraksi membentuk pola politik yang unik dan sangat praktis.